



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER MAROS

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BALAI BESAR VETERINER MAROS



🌐 bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id
✉ bbvetmaros@pertanian.go.id
☎ 085156438764

bbvetmaros



KATA PENGANTAR



Pembangunan pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan telah merumuskan suatu roadmap pengembangan komoditas unggulan utama yang menyebutkan pada tahun 2045 Indonesia diharapkan menjadi lumbung pangan dunia.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Veteriner Maros merupakan langkah kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Balai Besar Veteriner Maros tahun 2025-2029 dalam rangka mengoptimalkan kinerja fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana Kesehatan hewan menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan peternakan karena berperan langsung dalam menjaga produktivitas ternak serta mendukung kesehatan masyarakat melalui pengendalian zoonosis dan peningkatan mutu produk hewan serta pengujian penyakit hewan dan produk hewan, sehingga diharapkan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan nasional di pasar domestik maupun internasional.

Maros, 18 Desember 2025

Kepala Balai Besar Veteriner Maros



drh. H. Agustia, M.P.

NIP. 19700805 199803 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Capaian Renstra BBV Maros Tahun 2020-2024	19
1.3 Potensi dan Permasalahan	25
1.3.1. Potensi.....	25
1.3.2. Permasalahan.....	33
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR VETERINER MAROS	39
2.1 Visi Balai Besar Veteriner Maros	39
2.2 Misi Balai Besar Veteriner Maros	43
2.3. Tujuan Balai Besar Veteriner Maros	47
2.4. Sasaran Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros.....	53
BAB III ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN.....	58
3.1 Arah Kebijakan Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros	58
3.2. Kontribusi BBV Maros terhadap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	62
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	64
4.1 Target Kinerja	64
4.2. Kerangka Pendanaan	66
BAB V PENUTUP	67
LAMPIRAN	68-72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan populasi ternak sapi potong	6
Gambar 2. Perkembangan populasi ternak sapi perah	7
Gambar 3. Perkembangan populasi ternak kerbau.....	8
Gambar 4. Perkembangan populasi ternak kambing	8
Gambar 5. Perkembangan populasi ternak babi.....	9
Gambar 6. Perkembangan populasi ternak ayam petelur dan pedaging .	10
Gambar 7. Grafik PHMS di wilayah Kerja BBV Maros Tahun 2022-2024	14
Gambar 8. Hasil pengujian produk hewan di Wilker BBV Maros	16
Gambar 9. Grafik target dan realisasi sampel tahun 2020-2024.....	22
Gambar 10. Kerangka strategis Dirjen PKH tahun 2025-2029	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Janji layanan dan realisasi pengujian kesehatan hewan	11
Tabel 2. Janji layanan dan realisasi pengujian kemavet	15
Tabel 3. Target dan realisasi bantuan ternak BBV Maros	17
Tabel 4. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan BBV Maros	19
Tabel 5. Target dan Realisasi bantuan ternak	23
Tabel 6. Target dan realisasi layanan kesehatan masyarakat veteriner ..	24
Tabel 7. Daftar UPTVD di wilayah kerja BBV Maros.....	26
Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan IKSK BBV Maros Tahun 2025-2029	53
Tabel 9. Manajemen risiko sasaran kegiatan BBV Maros 2025-2029.....	55
Tabel 10. Kontribusi kegiatan Balai Besar Veteriner Maros dalam mendukung sasaran strategis dan sasaran program	62
Tabel 11. Tabel kinerja BBV Maros Tahun 2025-2029	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan telah merumuskan suatu roadmap pengembangan komoditas unggulan utama yang menyebutkan pada tahun 2045 Indonesia diharapkan menjadi lumbung pangan dunia. Kesehatan hewan menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan peternakan karena berperan langsung dalam menjaga produktivitas ternak serta mendukung kesehatan masyarakat melalui pengendalian zoonosis dan peningkatan mutu produk hewan. Penyelenggaraan kesehatan hewan yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk pencegahan, pengendalian, dan pengobatan penyakit, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan nasional di pasar domestik maupun internasional.

Balai Besar Veteriner Maros sebagai laboratorium pengujian penyakit hewan akan dituntut untuk melakukan transformasi mengawal Indonesia menuju lumbung pangan dunia. Sementara itu di sisi lain paradigma kesehatan hewan telah berubah pendekatannya dari *animal disease* ke *animal health* yang selanjutnya menjadi pendekatan *one health* yang telah disepakati di tingkat global. Berarti dalam penanganan kesehatan hewan tidak lagi melihat individu ternaknya tetapi lebih kepada populasi ternak, dan interaksinya dengan lingkungan hidup dan agen penyakit. Dengan semakin berkembangnya transportasi dan komunikasi akan menyebabkan mobilitas manusia dan barang termasuk ternak dan produk ternak semakin tinggi yang menyebabkan timbulnya bencana baru penyakit hewan (*emerging disease* dan *re emerging disease*) yang memerlukan penanganan sejak dini dari perkembangan yang ada. Penanganan dini tersebut (*early warning system*) adalah sistem manajemen keadaan darurat untuk kesiagaan dan respon darurat penyakit hewan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Veteriner Maros merupakan langkah kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (BBV Maros) Kementerian Pertanian Indonesia. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BBV Maros ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Undang- Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah subsektor peternakan.
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Renstra BBV Maros disusun sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Berbagai peraturan yang mengatur tentang penyusunan Renstra dan pengelolaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi acuan penting dalam penyusunan Renstra Balai Besar Veteriner Maros.

Dalam penyusunan Renstra ini, BBV Maros mengacu pada beberapa acuan penting, yaitu:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029:** Merupakan landasan utama dalam merumuskan visi, misi, serta strategi pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
2. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:** Renstra BBV Maros diselaraskan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam pencapaian tujuan bersama.
3. **Hasil Evaluasi Renstra Sebelumnya:** Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renstra yang baru.

Periode 2020-2024, awal periode pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan daya beli dan tutupnya sektor pelayanan publik, diikuti pemulihan bertahap pada tahun 2022-2024 yang disertai pergeseran preferensi konsumen ke produk yang lebih terjangkau seperti ayam ras dan telur akibat tekanan inflasi, serta peningkatan kesadaran akan produk dengan jaminan keamanan pangan. Dari segi penawaran, industri menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku pakan, wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), serta dampak fenomena iklim *La Nina* dan *El Nino* yang mempengaruhi ketersediaan hijauan. Kebijakan pemerintah hadir melalui instrumen impor bahan baku pakan dan produk peternakan serta program vaksinasi massal. Sementara itu, faktor lingkungan global seperti stabilitas keamanan multinasional yang mengganggu pasokan

pakan global, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi veteriner turut mempengaruhi biaya produksi dan kapasitas penanganan kesehatan hewan. Keberagaman seluruh faktor ini menciptakan ketidakpastian dalam indikator makro utama, dimana produksi dan populasi ternak mengalami hambatan, harga konsumen berfluktuasi, dan ketergantungan impor, memberikan pelajaran berharga tentang kerentanan sistem peternakan nasional. sekaligus pentingnya pendekatan terintegrasi berbasis *One Health* untuk membangun ketahanan subsektor peternakan yang berkelanjutan.

a. Tugas dan Fungsi Balai Besar Veteriner Maros

Balai Besar Veteriner Maros (BBV Maros) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tugas BBV Maros melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner. Dalam melaksanakan tugas, BBV Maros menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
3. Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan, serta penggunaan dan resistensi antimikroba;

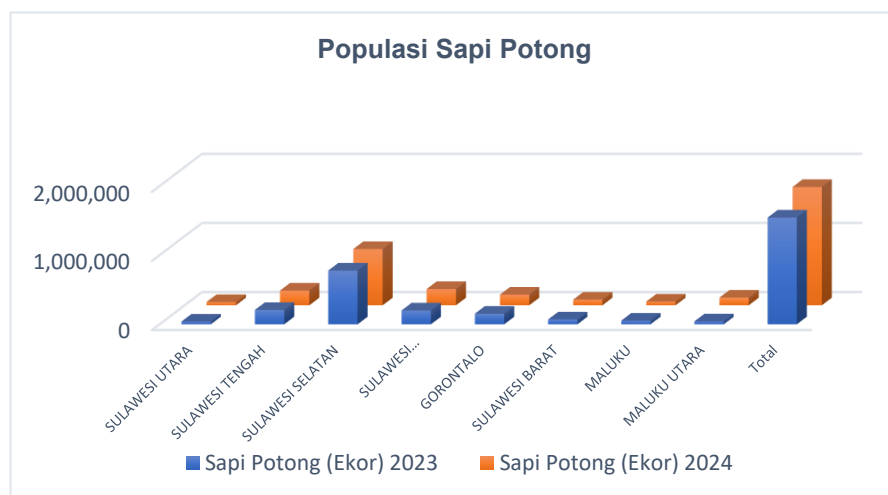
4. Pemeriksaan dan pengujian semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
5. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerja;
6. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan nasional dan acuan diagnosis penyakit hewan menular;
7. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
8. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi veteriner;
9. Pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium serta kesejahteraan hewan;
11. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di wilayah kerja;
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerja, serta pelayanan laboratorium veteriner lingkup UPT Veteriner Pusat;
13. Pelaksanaan analisis veteriner, dan penguatan terhadap teknik dan metode serta diseminasinya;
14. Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBV.

b. Populasi Ternak Wilayah Kerja Balai Besar Veteriner Maros

Renstra BBV Maros ini disusun dalam rangka mengoptimalkan kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Berdasarkan kondisi terkini, populasi ternak menunjukkan dinamika yang beragam di mana populasi ayam ras pedaging dan petelur relatif stabil, sementara populasi ternak ruminansia masih dalam proses pemulihan pasca wabah PMK.

Populasi sapi potong, Pada tahun 2023, terjadi penurunan populasi sapi potong yang disebabkan oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang terutama pada ternak ruminansia. Sebagai upaya mengendalikan penyebaran PMK tersebut, pemerintah telah melakukan vaksinasi secara masif pada seluruh ternak sapi potong yang tersebar di wilayah Indonesia.

Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan kasus dengan terbentuknya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi, sehingga secara perlahan kembali meningkatkan pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia. Peningkatan populasi ini juga didukung dengan kegiatan perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi serta mendorong peternak untuk terus melakukan pengendalian penyakit hewan menular melalui vaksinasi secara teratur.

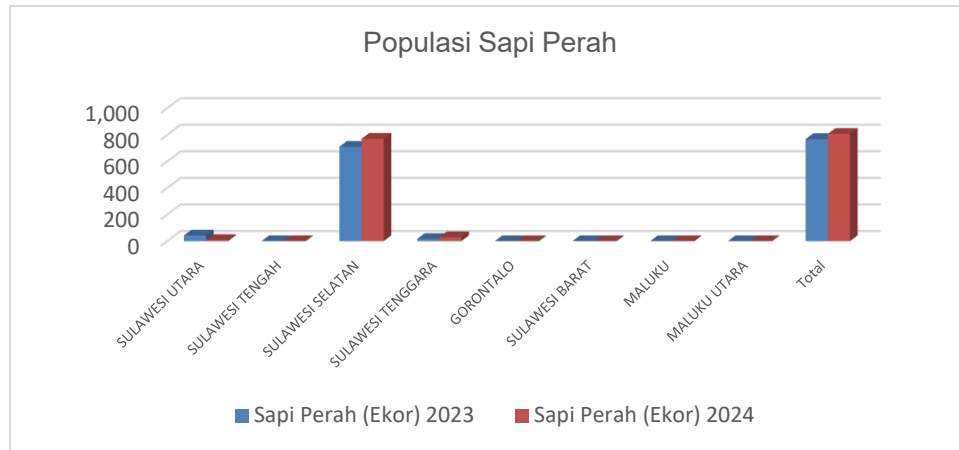


Sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 1. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Potong

Populasi sapi perah yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis sapi *Friesian Holstein* (FH) yang dikenal memiliki produksi susu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Terjadinya wabah PMK tidak hanya menurunkan populasi, tetapi juga menurunkan produktivitas sapi perah. Sebagaimana komoditas sapi potong, pada tahun 2024 komoditas sapi perah juga mulai mengalami peningkatan populasi karena adanya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi serta didukung dengan kegiatan

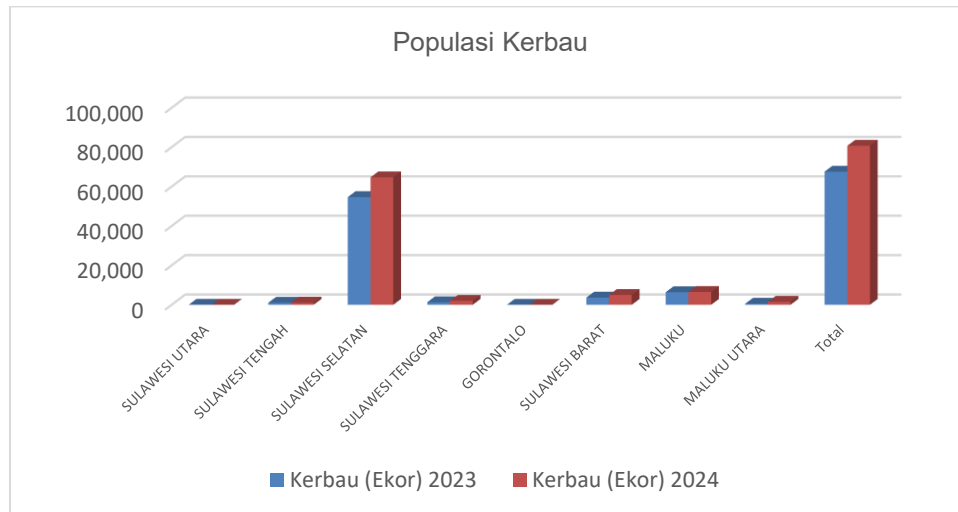
perbaikan kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi, serta adanya penambahan indukan sapi perah sehingga secara perlahan pertumbuhan populasi sapi perah mulai mengalami peningkatan.



Sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 2. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah

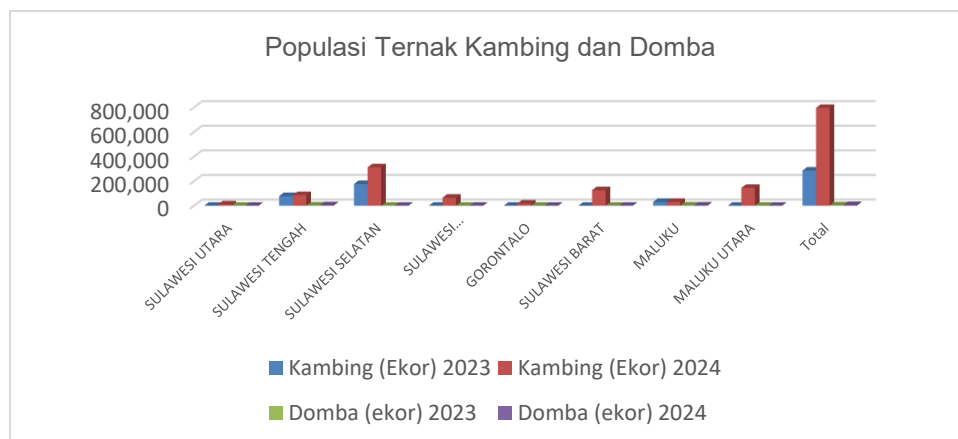
Populasi kerbau, sebagian besar ternak kerbau tenaganya digunakan untuk membajak sawah, namun dengan kemajuan teknologi, saat ini pembajakan sawah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Dari sisi teknis budidaya, ternak kerbau ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tingkat reproduksi kerbau yang rendah (tingkat kebuntingan sekitar 45%- 55%, tingkat kelahiran sekitar 45%-50%, dan birahi sulit dideteksi), serta sistem manajemen yang belum optimal karena perkawinan kerbau sebagian besar terjadi secara alami dan tidak ada pengaturan pemanfaatan pejantan sehingga kemungkinan terjadinya *inbreeding* cukup besar.



Sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 3. Perkembangan Populasi Ternak Kerbau

Populasi kambing/domba merupakan ternak yang umum diusahakan di Indonesia, pemanfaatan ternak kambing / domba pada umumnya digunakan untuk hewan Aqiqah, hewan qurban dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2023 populasi ternak kambing / domba juga terkena dampak dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan tahun 2024, terjadi peningkatan populasi kambing hal ini disebabkan adanya dukungan program pemberdayaan peternak dan bantuan bibit kambing.



Sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 4. Perkembangan Populasi Ternak Kambing

Populasi babi, wilayah Indonesia Timur. Masih merebaknya penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan kematian babi di sejumlah wilayah yang berdampak pada penurunan populasi babi di Indonesia. Saat ini kondisi peternakan babi di Indonesia sedang masa pemulihan pasca ASF dengan perbaikan sistem peternakan babi di Indonesia antara lain melalui aturan ketat pada lalu lintas ternak, penguatan biosekuriti di peternakan babi, manajemen pemeliharaan melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP) maupun *Good Breeding Practices* (GBP).



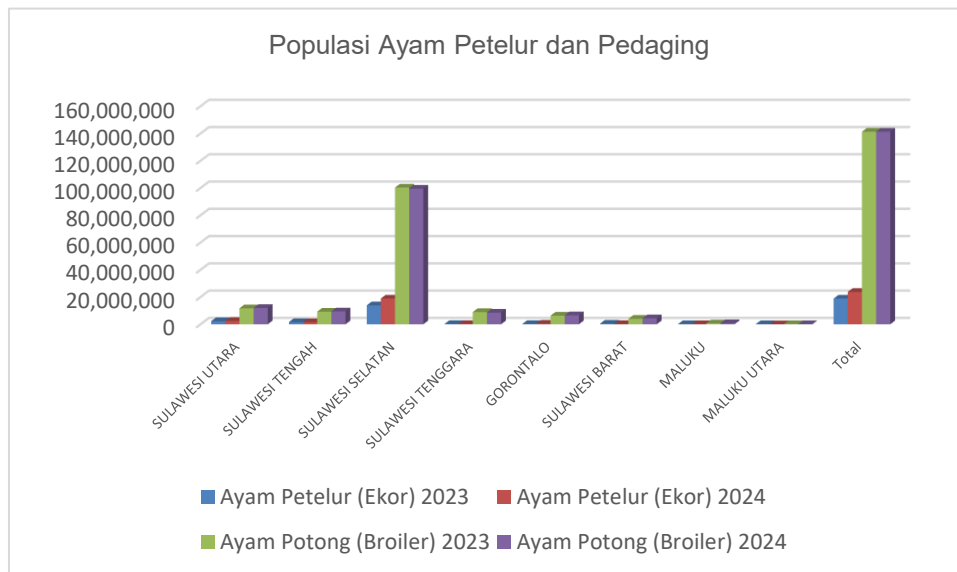
Sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 5. Perkembangan Populasi Ternak Babi

Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging.

Ayam ras petelur merupakan ayam ras yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya dan ayam ras pedaging (broiler) merupakan ayam yang mempunyai kemampuan produksi daging sangat cepat sehingga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ayam broiler berproduksi pada umur sekitar 4 – 5 minggu dengan bobot badan antara 1,2 – 1,9 kg/ekor dan ayam petelur berproduksi pada umur 9 minggu. Populasi ayam ras petelur dan ayam

ras pedaging meningkat dari tahun 2020 – 2024.



Sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 6. Perkembangan Populasi Ternak Ayam Petelur dan Pedaging

c. Kesehatan Hewan

Dalam melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Kesehatan Hewan tahun 2020-2024, indikator keberhasilan capaian program/kegiatan berupa persentase wilayah yang terkendali dari PHMS. Persentase wilayah yang terkendali PHMS merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di 34 provinsi yang dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS. Kebijakan dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada penyakit hewan yang berdampak kerugian ekonomi luas/tinggi, menyebar cepat, serta memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi atau berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI), dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Tabel 1. Janji layanan dan persentase capaian janji layanan pengujian Kesehatan Hewan

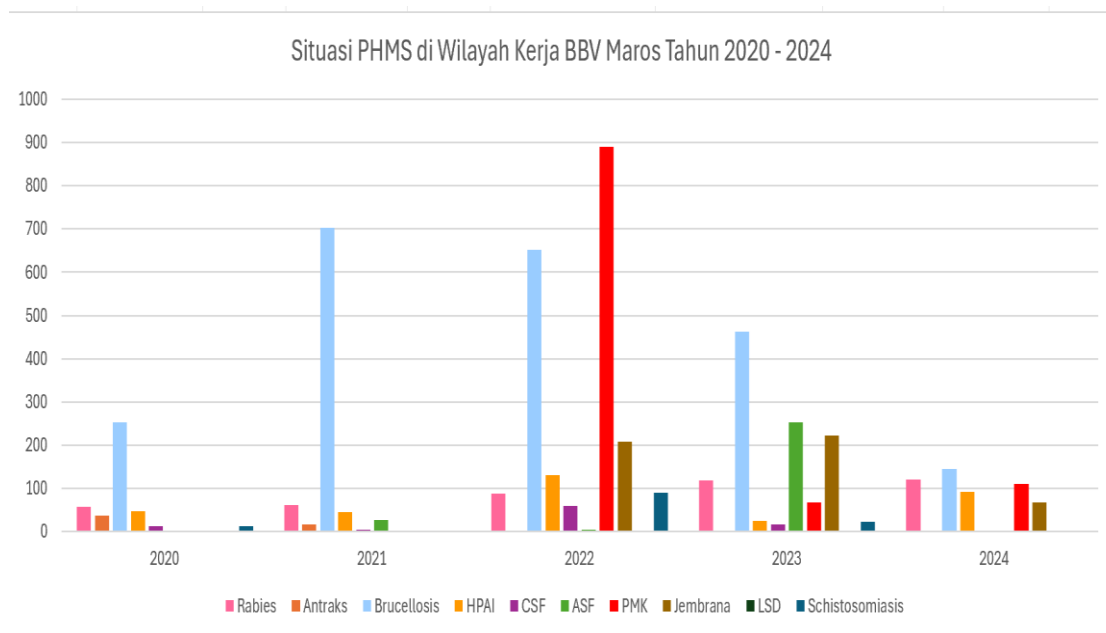
No	Pengujian Kesehatan Hewan	Standar waktu Pengujian (Hari)	Presentase (%)
			2024
1	African Swine Fever qPCR	4-8 hari	100%
2	AI H5 (2.1.3) HA HI	3-7 hari	100 %
3	AI H5 (2.3.2) HA HI	3-7 hari	100 %
4	AI H5 (2.1.3) HA HI	14-21 hari	100 %
5	AI H9 HA HI	3-7 hari	100 %
6	<i>Bacillus anthracis</i> cPCR	4-8hari	100 %
	<i>Bacillus anthracis</i> Isolasi dan Identifikasi	4-8 hari	100 %
8	<i>Bacillus anthracis</i> Pewarnaan Methylene Blue	4-5 hari	97 %
9	<i>Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ab</i>	2-5 hari	75 %
10	<i>Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ag</i>	2-5 hari	100 %
11	<i>Brucella abortus</i> CFT	2-5 hari	69 %
12	<i>Brucella abortus</i> RBT	2-5 hari	86 %
13	<i>Brucella melitensis</i> CFT	2-5 hari	89 %
14	<i>Brucella melitensis</i> RBT	2-5 hari	94 %
15	Cacing Identifikasi Mc Master	3-7 hari	100 %
25	Cacing Identifikasi Metode Apung	3-7 hari	100 %
26	Cacing Identifikasi Metode Natif	3-7 hari	100 %
27	Cacing Identifikasi Metode Sedimentasi	3-7 hari	95 %
28	Cacing Identifikasi Metode Whitlock	3-7 hari	100 %
30	<i>Clostridium</i> sp. Isolasi dan Identifikasi	7-14 hari	33 %
33	Darah Rutin Hematology Analyzer	3-5 hari	78 %
34	Diferential Leukocyte Count	3-5 hari	58 %
40	Identifikasi Spesies (Babi) cPCR	4-8 hari	50 %
41	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR0) Elisa Ab	2-5 hari	50 %
42	Influenza A qRT-PCR	3-7 hari	100 %
43	Jembrana Disease ELISA Ab	7-14 hari	100 %
44	Jembrana Disease Virus (JDV) cRT-PCR	4-8 hari	97 %

No	Pengujian Kesehatan Hewan	Standar waktu Pengujian (Hari)	Presentase (%)
			2024
45	Jembrana Disease Virus (JDV) qRT-PCR	4-8 hari	100 %
46	Leptospira sp. cPCR	4-8 hari	0 %
47	Lumpy Skin Disease (LSD) qPCR	4-8 hari	86 %
48	Newcastle Disease (ND) HA-HI	3-7 hari	94 %
49	Newcastle Disease Virus (ND) qRT-PCR	3-5 hari	75 %
50	Parasit Darah Identifikasi	2-5 hari	94 %
51	PCV Hematokrit Sentrifuge	3-5 hari	50 %
52	Pembacaan Slide Histopatologi	7-14 hari	100 %
53	Pembuatan Slide Histopatologi (Pewarnaan HE)	7-14 hari	60 %
54	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) NSP ELISA Ab	2-5 hari	98 %
55	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) qRT-PCR	3-7 hari	100 %
56	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) SP Serotipe O ELISA Ab	3-7 hari	100 %
57	Perubahan Patologi Anatomi Kepala Nekropsi	3-5 hari	100 %
58	Peste de Petits Ruminants (PPR) qRT-PCR	4-8 hari	50 %
59	Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) cRT-PCR	4-8 hari	100 %
60	Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) ELISA Ab	7-14 hari	100 %
61	Rabies ELISA Ab	3-7 hari	100 %
62	Rabies FAT	2-4 hari	99 %
63	Rabies Pewarnaan Seller's	2-4 hari	60 %

No	Pengujian Kesehatan Hewan	Standar waktu Pengujian (Hari)	Presentase (%)
			2024
65	Salmonella Pullorum Isolasi dan Identifikasi	4-8 hari	60 %
66	Salmonella Pullorum Rapid Test Agglutination	4-8 hari	83 %
68	Sianida Toksikologi Kualitatif	2-4 hari	100 %
70	Total Protein Refraktometer	3-5 hari	50 %
71	Toxoplasma gondii ELISA	3-7 hari	67 %
72	Trypanosoma sp Giemsa	2-5 hari	97 %
73	Uji Histopatologi	7-14 hari	92 %

Pada kurun waktu 2022-2024, terdapat isu strategis dengan munculnya penyakit eksotik dan *emerging infectious disease (new emerging infectious disease dan re-emerging infectious Disease)* salah satunya adalah PMK. Setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1986 dan diakui *World Organization for Animal Health (WOAH)* sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi pada tahun 1990, PMK kembali muncul di Indonesia pada tahun 2022.

Perkembangan kasus PMK dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan, salah satunya karena pengendalian yang dilaksanakan melalui vaksinasi PMK, sehingga berhasil meningkatkan kekebalan ternak. Data perkembangan kasus PHMS di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 7. Situasi PHMS di Wilayah Kerja BBV Maros 2020-2024 (RABAH; Schistosomiasis, PMK, LSD, ASF).

d. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kesmavet merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan). Sedangkan, Kesejahteraan Hewan merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan).

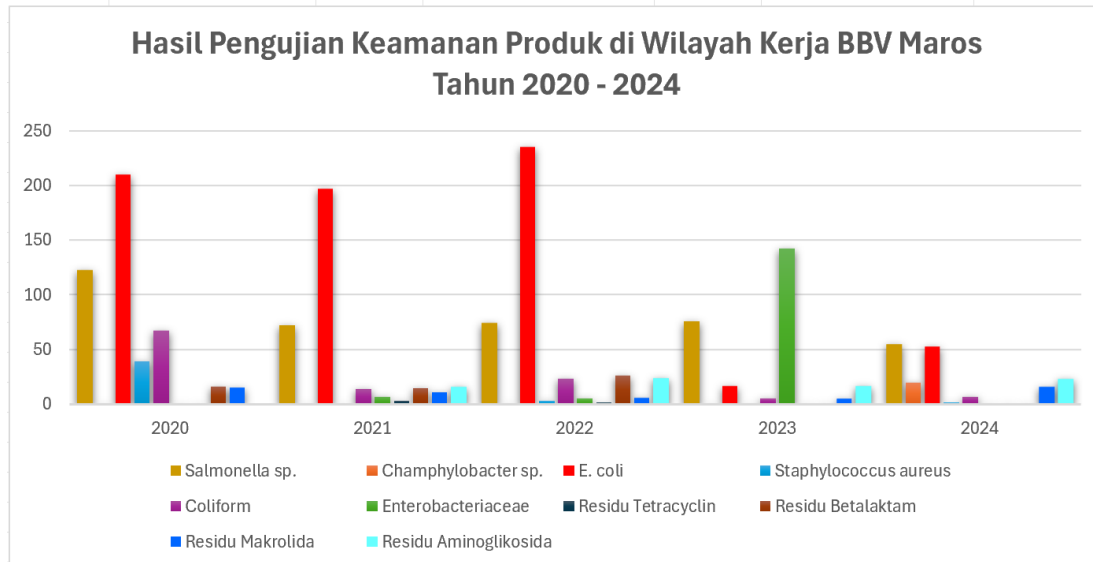
Peningkatan kesmavet merupakan salah satu arah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian sebagai bentuk kontribusi Kementerian Pertanian terhadap Kesehatan Masyarakat Indonesia, khususnya dari dampak *zoonosis* dan penyimpangan produk hewan bagi kesehatan manusia.

Tabel 2. Janji layanan dan persentase capaian janji layanan pengujian Produk Hewan.

No	Pengujian Produk Hewan	Standar waktu Pengujian (Hari)	Presentase (%)
			2024
1	ALT Enumerasi	7-14 hari	100 %
2	Campylobacter spp. Isolasi dan Identifikasi	18-21 hari	96 %
3	Coliform Enumerasi	7-14 hari	100 %
4	Coliform MPN	7-14 hari	100 %
5	E. coli Enumerasi	7-14 hari	100 %
6	E. coli Isolasi dan Identifikasi	7-14 hari	60 %
7	E. coli MPN	7-14 hari	100 %
8	Enterobacteriaceae Enumerasi	7-14 hari	100 %
9	Formalin Kualitatif	3-5 hari	88 %
10	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	7-14 hari	100 %
11	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	14-21 hari	100 %
12	Staphylococcus aureus Enumerasi	7-14 hari	100 %

Produk hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal, kecerdasan dan kesehatan masyarakat. Meskipun produk hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia, produk hewan merupakan bahan yang mudah rusak (*perishable*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*potential hazardous*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah

daerah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi Masyarakat. Keamanan produk hewan juga menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk dan akselerasi ekspor.



Gambar 8. Hasil pengujian keamanan produk hewan di wilayah kerja BBV Maros Tahun 2020-2024.

Kesejahteraan Hewan menjadi isu global karena merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh rantai produksi dan pemeliharaan hewan terkait kesehatan, produktivitas, serta keamanan dan mutu pangan asal hewan. Penerapan kesrawan juga berperan dalam mencegah timbulnya penyakit, mengurangi risiko penularan *zoonosis*, serta mendukung strategi *One Health* yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

e. Perbibitan dan produksi Ternak

Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses produksi ternak, sehingga dalam perkembangannya selain kuantitas juga diperlukan kualitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 yang mengatur tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Nasional menyatakan bahwa perbibitan nasional mencakup penyediaan benih dan bibit

ternak, peredaran benih dan bibit ternak, pengawasan benih dan bibit ternak, dan/atau kelembagaan perbibitan.

Produksi benih dan/atau bibit pemerintah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan sebanyak tiga unit produksi benih ternak dan tujuh unit produksi bibit ternak yang berlokasi di beberapa provinsi. Balai Besar Veteriner Maros sejak tahun 2020 - 2024 melakukan kegiatan pendistribusian benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak dengan bentuk kegiatan berupa bantuan ternak ruminansia (Sapi atau Kambing/Domba potong) dan Ternak Unggas. Berikut pendistribusian bantuan ternak yang dilakukan BBV Maros selama tahun 2020-2024 (Tabel 3). Pendistribusian benih dan bibit ternak unggul diharapkan dapat mendukung usaha budidaya ternak dalam meningkatkan produksi daging, susu dan telur.

Tabel 3. Pendistribusian Bantuan Ternak BBV Maros Tahun 2020-2024

No	Bantuan Ternak		Jumlah (Ekor)				
	Provinsi	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sulawesi Selatan	Sapi	200				
2	Sulawesi Tengah	Sapi	100				
3	Sulawesi Selatan	Ayam	4,500				
4	Sulawesi Barat	Ayam	1,000				
5	Sulawesi Selatan	Kambing		550			
6	Sulawesi Barat	Kambing		450			
7	Sulawesi Tenggara	Kambing		225			
8	Sulawesi Tengah	Kambing		125			
9	Sulawesi Utara	Kambing		50			
10	Gorontalo	Kambing		50			
11	Sulawesi Selatan	Sapi		40			
12	Sulawesi Barat	Sapi		20			
13	Sulawesi Tenggara	Sapi		20			
14	Papua	Sapi		20			
15	Maluku Utara	Ayam			6,000		
16	Maluku	Ayam			12,000		

No	Bantuan Ternak		Jumlah (Ekor)				
	Provinsi	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
17	Papua	Ayam			6,000		
18	Sulawesi Selatan	Kambing			825		
19	Sulawesi Selatan	Sapi			480		
20	Maluku Utara	Ayam				3,000	
21	Maluku	Ayam				6,000	
22	Sulawesi Selatan	Kambing				925	
23	Sulawesi Barat	Kambing				75	
24	Sulawesi Selatan	Sapi				700	
25	Sulawesi Barat	Sapi				60	
26	Sulawesi Selatan	Kambing					300
27	Sulawesi Selatan	Ayam petelur					
28	Sulawesi Barat	Ayam petelur					
29	Sulawesi Tenggara	Ayam petelur					
30	Sulawesi Tengah	Ayam petelur					
Jumlah			5,800	1,550	25,305	10,760	300

f. Hilirisasi Hasil Peternakan

Hilirisasi di sektor pertanian termasuk subsektor peternakan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global. Pascapanen dan kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antara hulu hilir, serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk pangan hewani seperti daging, susu, telur, serta berbagai produk olahannya.

Salah satu faktor kunci dalam pengembangan pascapanen, pengolahan dan distribusi adalah modernisasi rantai pasok. Banyak perusahaan peternakan besar dan menengah telah mengadopsi teknologi *cold chain* (rantai dingin) untuk menjaga kualitas produk, terutama daging dan susu, selama proses distribusi. Sistem logistik berbasis digital juga semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan ketertelusuran (*traceability*). Namun,

tantangan masih ada, terutama dalam mendistribusikan produk ke daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur yang belum memadai.

BBV Maros juga aktif melakukan pengujian jaminan mutu dan keamanan pangan. Pengawasan terhadap unit usaha dan produk peternakan untuk penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan bersama-sama BPOM, Satgas Pangan dan Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di daerah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, sertifikasi halal menjadi prioritas untuk memastikan penjaminan produk halal bagi konsumen.

1.2 Capaian Renstra BBV Maros Tahun 2020-2024

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BBV Maros periode 2020-2024, penting untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih dalam lima tahun terakhir. Analisis capaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, program, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih adaptif dan responsif dalam Renstra BBV Maros periode 2025-2029. Analisis capaian BBV Maros dilakukan terhadap capaian dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Renstra periode 2020-2024.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BBV Maros Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada layanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Veteriner (BBV) Maros yang diberikan	3,5 Skala Likert	3,44 Skala Likert	3,00 Skala Likert	3,10 Skala Likert	3,10 Skala Likert
		Nilai pembangunan zona integritas (ZI) Balai Besar Veteriner Maros	-	-	-	-	80 Nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Tercapainya target layanan Kesehatan hewan di wilayah kerja BBV Maros	-	2 Layanan	1 Layanan	-	-
		Tercapainya target sampel pengamatan dan identifikasi penyakit hewan di wilayah kerja BBV Maros	15.788 Sampel	11.408 Sampel	50.787 Sampel	43.342 Sampel	10 Sampel
		Tercapainya sarana bidang kesehatan hewan	-	-	1 Unit	3 Unit	-
3.	Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Terdistribusinya ternak ruminansia potong pada kelompok penerima bantuan	300 Ekor	1.550 Ekor	1.305 Ekor	1.760 Ekor	300 Ekor
		Terdistribusinya ternak unggas dan aneka ternak pada kelompok penerima bantuan	-	-	24.000 Ekor	9.000 Ekor	-
4.	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat veteriner	Tercapainya target sampel/produk mutu dan keamanan produk peternakan di wilayah kerja BBV Maros	750 Produk	750 Produk	1000 Produk	1100 Produk	-
		Tercapainya target sarana kesmavet	-	4 unit	-	1 Unit	-
5.	Meningkatnya layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	Tercapainya layanan dukungan manajemen internal	12 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3 Layanan	7 Layanan
		Tercapainya layanan manajemen kinerja internal	3 Layanan	3 Layanan	6 Dokumen	7 Dokumen	12 dokumen

Berikut adalah penjelasan dari masing masing capaian dari masing masing Sasaran Kegiatan BBV Maros:

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada layanan prima

Sasaran Kegiatan terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu (1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBV) Maros; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Veteriner (BBV) Maros.

Standar pelayanan publik yang telah ditetapkan meliputi standar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan meliputi : ruang lingkup layanan, nilai dan etika pelayanan, maklumat layanan, prosedur pelayanan (SOP), waktu penyelesaian yang disepakati (Mutu baku), biaya/tarif dan saluran pengaduan. Pegawai BBV Maros melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 17025:2017, ISO 45001:2018, dan ISO 35001:2019, serta melaksanakan seluruh SOP yang berlaku.

BBV Maros terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan untuk mendapatkan layanan berdasarkan janji layanan yaitu cepat, tepat, dan akurat pada unsur (1) persyaratan pelayanan; (2) prosedur pelayanan; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan keluhan.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas. Pembangunan ZI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pelaksanaan Reformasi

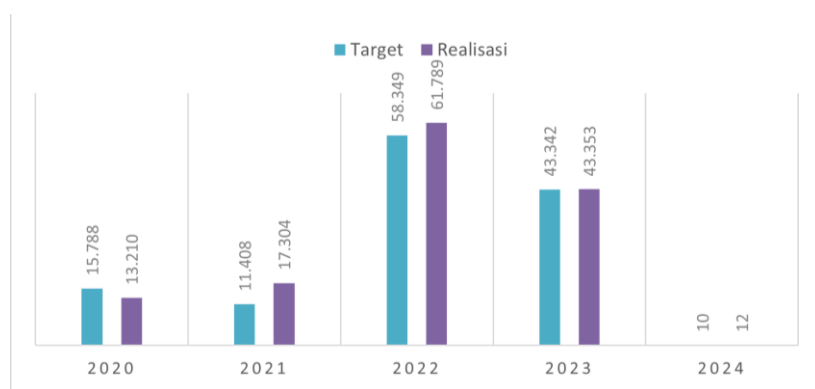
Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Adapun penilaian dilakukan dengan memenuhi *evidence* pada 6 komponen atau area perubahan, diantaranya:

1. Area perubahan Manajemen Perubahan
2. Area perubahan Penata Tatalaksana
3. Area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Area perubahan Penguatan Pengawasan
6. Area perubahan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Perbandingan realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas BBV Maros tahun 2024 adalah 89,58 dari target 80 (111,98%).

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

Sasaran Kegiatan peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan diukur dengan 2 (dua) indikator 1. Tercapainya target pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerja BBV Maros; 2. Tercapainya target sampel pengamatan dan identifikasi penyakit hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros dan Tercapainya sarana bidang kesehatan hewan



Sumber : Lakin BBV Maros, 2024

Gambar 9. Target dan Realisasi Sampel Tahun 2020-2024.

Berdasarkan data realisasi penerimaan sampel tahun 2020-2024 diatas, maka terjadi penurunan jumlah persentase realisasi sampel pada tahun 2024. Jumlah target dan realisasi di tahun 2024 tergolong rendah dibandingkan dengan target di tahun 2020-2023 dikarenakan pada tahun 2024 terjadi perubahan anggaran. Sehingga pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan berdasarkan DIPA tidak dilakukan, namun demikian pada tahun 2024 identifikasi sampel dilakukan berdasarkan sampel pasif dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh BBV Maros maupun Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah tercapai dengan baik.

Sasaran Kegiatan (SK) 3: Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak di wilayah yang menerima bantuan ternak. Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (Dua) indikator kinerja yaitu 1. Terdistribusinya ternak ruminansia potong pada kelompok penerima bantuan; 2. Terdistribusinya ternak unggas dan aneka ternak pada penerima bantuan.

Tabel 5. Target dan Realisasi bantuan ternak.

Target dan Realisasi Ternak Rumpot	2020	2021	2022	2023	2024
Target (ekor)	300	1.550	1.305	1.760	300
Realisasi (ekor)	300	1.550	1.305	1.760	300

Sumber; Lakin BBV Maros Tahun 2024.

Tabel di atas menunjukkan persentase realisasi bantuan ternak dari tahun 2020 hingga 2024, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya tercapai 100%. Pencapaian kinerja ini ditunjang adanya 1. Kegiatan bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan ternak yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan peternak/kelompok ternak; 2. Pengadaan ternak

menggunakan sistem *e-purchasing/e-katalog* yang dapat mempercepat proses pengadaan dan 3. Dukungan yang baik dari dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat veteriner

Selama periode tahun 2020–2024, Balai Besar Veteriner Maros melaksanakan kegiatan penyidikan dan pengujian keamanan produk hewan. Sasaran Kegiatan ini adalah meningkatnya layanan kesehatan masyarakat veteriner dan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu : 1. Tercapainya target sampel/produk mutu dan keamanan produk peternakan di wilayah kerja kerja Balai Besar Veteriner Maros; 2. Tercapainya target sarana kesmavet.

Tabel 6. Target dan Realisasi layanan kesehatan masyarakat veteriner

Target dan Realisasi Layanan Kesmavet	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Produk)	750	750	1.000	1.100	750
Realisasi (Produk)	750	750	1.000	1.100	750

Sumber; Lakin BBV Maros Tahun 2024.

Tabel di atas menunjukkan, persentase realisasi layanan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2020 hingga 2024 sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini ditunjang adanya 1. Ketersediaan bahan uji yang dibutuhkan; 2. Dukungan yang baik dari dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan; 3. Pelatihan maupun bimbingan teknis yang diikuti oleh tenaga medik dan paramedik dalam upaya meningkatkan kualitas SDM BBV Maros; 4. Penjaminan mutu BBV Maros berupa ISO 17025:2017; 9001:2015, ISO 37001:2016; ISO 45001:2018, dan ISO 35001:2019.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH

Selama periode tahun 2020–2024, Balai Besar Veteriner Maros memiliki kegiatan berupa layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Peternakan, sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dengan indikator kinerja berupa layanan Barang Milik Negara, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Pemantauan dan Evaluasi dan Layanan Manajemen Keuangan.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Renstra BBV Maros 2025-2029, diperlukan analisis mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Analisis potensi dan permasalahan dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan BBV Maros. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan nasional. Dengan memahami kondisi eksisting, tren global, serta dinamika kebijakan yang berkembang, BBV Maros dapat merumuskan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan subsektor peternakan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berikut adalah potensi dan permasalahan terkait peternakan dan kesehatan hewan nasional:

1.3.1. Potensi

Berdasarkan hasil uraian capaian kinerja peternakan dan kesehatan hewan sebelumnya, maka perlu dirumuskan beberapa potensi yang meliputi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh BBV Maros dalam menyusun arah kebijakan,

strategi, program, dan kegiatan sesuai visi dan misi BBV Maros tahun 2025-2029. Berikut adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBV Maros yang harus dimanfaatkan sebaik baiknya:

1. Populasi ternak

Populasi ternak di 8 (delapan) provinsi wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros mencakup berbagai jenis komoditas dengan jumlah cukup besar dan beragam, hal ini mencerminkan pentingnya sektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan di Pulau Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara. Pada tahun 2024 populasi sapi potong mencapai sekitar 1,712 ribu ekor, Sapi Perah 0807 ekor, Kerbau 556 ribu ekor, Kambing 795 ribu ekor, Domba .562 ekor, Babi 1.004 ribu ekor, Ayam ras petelur 23.745 ribu ekor dan ayam ras pedaging 141.316 ribu ekor (Sumber: ASEM 2024, Buku Statistik PKH). Usaha peternakan pada umumnya masih bersifat tradisional sehingga mempengaruhi produktivitasnya secara keseluruhan.

2. Eksistensi Unit Pelaksana Teknis Veteriner Daerah (UPTVD)

Unit Pelaksana Teknis Veteriner Daerah (UPTVD) terdiri atas Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Laboratorium Veteriner Provinsi / Kabupaten / Kota, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Rumah Potong Unggas. Ketersediaan dan Eksistensi Unit Pelaksana Teknis ini memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

3. Kekayaan sumber daya genetik ternak lokal

Wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros memiliki kekayaan plasma nutfah ternak lokal yang beragam, seperti sapi Bali. Keanekaragaman genetik ini merupakan kekuatan strategis dalam menjaga ketahanan bibit nasional dan kemandirian sumber daya genetik di tengah ketergantungan global terhadap impor bibit. Potensi ini dapat dikembangkan untuk menghasilkan varietas ternak unggul yang adaptif terhadap lingkungan lokal, efisien dalam pakan, serta tahan terhadap penyakit endemik.

4. Kerangka regulasi dan kebijakan mendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan

Subsektor peternakan dan kesehatan hewan didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta berbagai peraturan pelaksana di bawahnya.

5. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Dengan meningkatkan produksi sumber pangan bergizi seperti daging, telur, dan susu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Populasi ternak penghasil daging, telur, dan susu perlu ditingkatkan melalui program pembibitan dan budidaya yang baik dengan memanfaatkan sumber daya genetik ternak lokal secara berkelanjutan. Selain itu, investasi di subsektor peternakan harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ternak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

6. Penerapan Praktik Peternakan yang Baik (*Good Breeding/Farming Practices*)

Penerapan praktik peternakan yang baik, seperti *Good Breeding Practices* (GBP) *Good Farming Practices* (GFP) sangat penting untuk menghasilkan ternak yang produktif. Praktik ini mencakup manajemen pemeliharaan, pemberian pakan berkualitas, dan penerapan biosekuriti yang ketat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peternak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ternak mereka. Selain itu, jaminan usaha peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan efisien.

7. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan

Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan merupakan langkah kritis untuk menjaga kesehatan hewan dan melindungi masyarakat dari zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Penyakit hewan menular seperti ASF, PMK, dan AI dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, perlu disusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit hewan. Sistem pengawasan (*surveillance system*) yang kuat harus ditingkatkan untuk mendeteksi dini dan merespon cepat wabah penyakit. Selain itu, penerapan biosekuriti yang ketat di peternakan dan integrasi teknologi dalam kesehatan hewan dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem ketahanan dan kesehatan hewan nasional.

8. Sumber Pakan

Jagung merupakan salah satu bahan pakan ternak unggas, produksi jagung berdasarkan data dari BPS dengan link sebagai berikut : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwNCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-jagung-menurut-provinsi.html> di tahun 2024 produksi jagung di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros yaitu Provinsi Sulawesi Utara 112.771.90 ton; Sulawesi Tengah 84.798.45 ton; Sulawesi Selatan 1.131.504.00 ton; Sulawesi Tenggara 79.444.29 ton; Gorontalo 625.972,10 ton; Sulawesi Barat 30.295,93 ton; Maluku 7.582,60 dan Maluku Utara 4.530,02 ton.

9. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta *stakeholder* terkait kesehatan hewan dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah penyebaran *Zoonosis*, promosi keamanan produk hewan, dan resistensi antimikroba. Masyarakat perlu memahami bahaya *Zoonosis* dan cara mencegah penularannya, seperti melakukan vaksinasi hewan, menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan hewan yang sakit. Selain itu, *stakeholder* di subsektor peternakan harus diedukasi tentang bahaya resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kesadaran tentang pentingnya

keamanan pangan segar asal hewan dan olahan juga perlu ditingkatkan untuk melindungi kesehatan konsumen.

10. Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Keamanan dan mutu produk hewan adalah faktor penting untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Produk hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan teknis keamanan produk hewan yang ketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri dan menjamin keamanan produk hewan. Di sisi lain, produk hewan nasional juga harus memenuhi standar keamanan dan mutu untuk ekspor agar dapat bersaing di pasar global. Penjaminan keamanan dan mutu produk hewan, mulai dari hulu hingga hilir, harus dilakukan secara konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap aspek keamanan dan mutu produk hewan.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BBV Maros dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingginya permintaan produk peternakan di masyarakat

Permintaan terhadap produk peternakan, seperti daging, telur, dan susu, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Tren ini memberikan peluang besar bagi BBV Maros untuk mendorong peningkatan produksi di regional Pulau Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, memperkuat sistem logistik pangan hewani, dan memperluas pasar domestik maupun ekspor. Permintaan yang tinggi juga menjadi insentif bagi pengembangan agribisnis peternakan yang lebih modern dan efisien.

Selain itu, Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis yang sedang dilaksanakan pemerintah, juga menjadi peluang pasar karena membutuhkan pangan asal hewan dalam jumlah besar. Keamanan pangan juga menjadi isu strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Dukungan kebijakan nasional terhadap ketahanan pangan

Dukungan kebijakan nasional terhadap ketahanan pangan, khususnya pangan asal hewan, merupakan salah satu kekuatan strategis utama dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional dalam berbagai dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, termasuk RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menegaskan pentingnya penguatan produksi pangan dalam negeri, peningkatan nilai tambah, dan pengamanan rantai pasok pangan hewani yang berkelanjutan.

3. Efisiensi dan Hilirisasi Produk Peternakan

Efisiensi dan hilirisasi produk peternakan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk asal ternak. Dengan memangkas rantai distribusi, harga jual produk di tingkat peternak dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pendapatan peternak. Hilirisasi produk peternakan, seperti pengolahan daging, susu, dan telur menjadi produk bernilai tambah, juga dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Inovasi teknologi dalam sistem pemasaran dan distribusi dapat membantu mengoptimalkan efisiensi subsektor peternakan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Penguatan kelembagaan peternak dan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk mendukung pengembangan subsektor peternakan. Kelembagaan peternak yang kuat dapat membantu peternak kecil mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar. Koordinasi dengan Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan regulasi di subsektor peternakan.

5. Kemajuan teknologi digital dan bioteknologi

Perkembangan teknologi digital dan bioteknologi memberikan peluang besar bagi transformasi subsektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, dan sistem informasi geografis (GIS) memungkinkan peningkatan efisiensi produksi, pemantauan kesehatan hewan secara real-time, serta penguatan sistem *traceability* dan penjaminan keamanan produk asal hewan. Di sisi bioteknologi, kemajuan dalam bidang reproduksi, genetika, vaksin, dan pakan fermentasi membuka ruang peningkatan produktivitas dan ketahanan ternak terhadap penyakit. Transformasi digital ini sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju pertanian cerdas (*smart agriculture*) dan peternakan presisi (*precision livestock farming*) yang berdaya saing dan berkelanjutan.

6. Pasar ekspor produk peternakan dan halal global

Peningkatan permintaan global terhadap produk peternakan dan pangan halal memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor. Negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika memiliki kebutuhan tinggi terhadap daging, telur, susu, serta produk olahan halal. Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan produk halal dengan dukungan sistem sertifikasi halal nasional yang diakui secara internasional. Melalui pemenuhan persyaratan sanitasi (kesehatan hewan dan keamanan produk hewan), penguatan mutu produk dan pengembangan infrastruktur rantai dingin, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar produk peternakan dan halal global di masa mendatang.

7. Kerja sama internasional dan dukungan mitra pembangunan

Peluang kerja sama internasional dengan lembaga multilateral dan mitra pembangunan semakin terbuka luas dalam mendukung penguatan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Dukungan teknis dan pembiayaan dari lembaga seperti FAO, WOAH, IFAD, JICA, serta mitra bilateral lainnya berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas riset dan inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru. Program kerja sama internasional juga berkontribusi terhadap peningkatan sistem kesehatan hewan nasional, penjaminan keamanan produk hewan, pencegahan dan pengendalian

zoonosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pengembangan peternakan berkelanjutan yang selaras dengan pendekatan *One Health*. Kolaborasi ini menjadi peluang strategis untuk mempercepat modernisasi subsektor peternakan Indonesia.

8. Dukungan swasta dan masyarakat terhadap agribisnis peternakan

Semakin meningkatnya minat pihak swasta, koperasi, dan masyarakat terhadap usaha peternakan modern membuka peluang besar bagi penguatan rantai nilai agribisnis nasional. Peran pelaku usaha dalam pengolahan hasil, distribusi, dan pemasaran produk peternakan dapat memperluas akses pasar dan menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat peternak. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan bergizi, aman, dan sehat mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk asal hewan dalam negeri. Keterlibatan generasi muda dan wirausaha baru di bidang peternakan juga menjadi katalisator bagi munculnya inovasi usaha dan adopsi teknologi baru dalam pengelolaan peternakan yang efisien dan ramah lingkungan.

9. Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Subsektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu bidang yang semakin menarik bagi investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta pengembangan kawasan industri peternakan terpadu memberikan peluang besar untuk peningkatan investasi di bidang produksi, pengolahan hasil ternak, dan logistik rantai dingin. Selain itu, meningkatnya minat investor terhadap konsep pertanian hijau dan ekonomi sirkular mendorong pengembangan teknologi pengolahan limbah menjadi biogas, pupuk organik, serta bahan baku industri. Investasi subsektor peternakan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan daya saing produk peternakan Indonesia di pasar global.

1.3.2. Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan dapat dijabarkan dalam kelemahan dan ancaman dihadapi oleh BBV Maros. Berikut ini beberapa kelemahan dari BBV Maros yaitu:

1. Regulasi

Regulasi peternakan dan kesehatan hewan pada dasarnya telah disusun untuk menjamin pembangunan peternakan yang berkelanjutan, keamanan pangan asal hewan, serta perlindungan dari penyakit hewan menular. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan. Salah satu persoalan utama adalah masih terjadinya fragmentasi kebijakan antar instansi dan kurangnya sinergi regulasi antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran regulasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan saat ini. Salah satu titik lemah dalam implementasi regulasi peternakan dan kesehatan hewan adalah pengawasan dan penegakan hukum.

2. Manajemen Anggaran dan Program

Perubahan struktur anggaran untuk fokus pada penanganan wabah penyakit dan dampak bencana alam seringkali mengganggu program program peternakan yang sudah direncanakan. *Refocusing* program diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan yang mendesak. Disamping permasalahan terkait *refocusing* anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat juga sering menjadi tantangan tersendiri untuk BBV Maros, seperti kebijakan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak para pembiayaan program yang telah direncanakan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan dan kesehatan hewan masih belum mencukupi, baik dari segi jumlah maupun pemerataan antar wilayah. Petugas teknis seperti dokter hewan, paramedik veteriner, inseminator, dan tenaga lapangan belum tersebar secara proporsional sesuai kebutuhan daerah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya upaya pembinaan teknis peternakan dan kesehatan hewan,

pelaksanaan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas, penjaminan keamanan produk hewan dan peningkatan kesadaran masyarakat/pelaku usaha.

4. Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional

Sistem data dan informasi di subsektor peternakan belum sepenuhnya terintegrasi antara pusat dan daerah. Data populasi, produksi, distribusi ternak, dan penyakit hewan seringkali belum diperbarui secara real-time, serta masih tersebar dalam berbagai sistem yang belum saling terhubung. Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan dan perencanaan program belum sepenuhnya berbasis pada data yang akurat dan mutakhir. Saat ini sudah dikembangkan sistem pelaporan peternakan dan kesehatan hewan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

3. Kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang belum merata

Sebagian besar laboratorium veteriner di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas dan peralatan pengujian, ketersediaan bahan standar dan tenaga analis yang kompeten. Kapasitas pengujian dan standar mutu laboratorium pun belum seragam di seluruh wilayah. Akibatnya kemampuan deteksi dini, diagnosis cepat, pengujian produk hewan dan respon terhadap penyakit hewan menular strategis maupun zoonosis masih belum optimal.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan

Infrastruktur pendukung subsektor peternakan, seperti puskesmas, unit pembibitan, rumah potong hewan (RPH), gudang pakan, fasilitas pendingin (*cold storage*), serta sarana transportasi dan logistik, masih terbatas jumlah dan kapasitasnya. Kondisi ini berpengaruh terhadap efisiensi produksi, distribusi produk hewan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta penjaminan

keamanan produk hewan di berbagai wilayah, terutama di luar sentra utama produksi.

5. Koordinasi lintas unit dan lintas sektor belum optimal

Sinergi antara unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, maupun dengan kementerian/lembaga terkait (seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Karantina Indonesia, Bapanas, BPOM, BKPM, BPJPH) dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Akibatnya, beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti pengendalian zoonosis, penjaminan keamanan pangan asal hewan, fasilitasi ekspor produk hewan, dan investasi peternakan belum terimplementasi secara efektif dan terpadu.

6. Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di seluruh rantai pasok

Sistem jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan masih menghadapi tantangan seperti penerapan Sertifikasi NKV, registrasi produk hewan, lalu lintas produk hewan, sertifikasi halal, dan penerapan standar teknis lainnya di seluruh rantai pasok. Variasi mutu produk antar daerah serta keterbatasan jumlah pengawas dan laboratorium pengujian menyebabkan produk hewan domestik belum sepenuhnya memenuhi standar nasional maupun internasional, sehingga daya saingnya masih relatif rendah.

Sedangkan tantangan yang harus diantisipasi oleh BBV Maros dalam pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain:

1. Penyakit Hewan dan Zoonosis

Penyakit hewan, terutama yang bersifat *Zoonosis*, menjadi tantangan serius bagi subsektor peternakan dan kesehatan masyarakat. Penyakit seperti PMK dan AI tidak hanya menurunkan populasi dan produktivitas ternak tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Biaya pengobatan untuk ternak dan manusia yang tertular penyakit ini dapat sangat tinggi, bahkan berpotensi menyebabkan

kematian. Perubahan iklim memperparah situasi ini dengan meningkatkan stres pada hewan, virulensi agen penyakit, dan munculnya *emerging Zoonotic disease* khususnya *vector borne diseases*. Oleh karena itu, program pengendalian penyakit melalui vaksinasi, biosekuriti, dan sistem pengawasan yang masif harus diimplementasikan.

2. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menimbulkan tantangan besar bagi peternakan, seperti penurunan produktivitas Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan peningkatan kerentanan ternak terhadap penyakit serta munculnya *vector borne diseases* di wilayah baru (*emerging zoonotic disease*). Stres pada hewan akibat cuaca ekstrem dan peningkatan virulensi agen penyakit memerlukan strategi adaptasi yang komprehensif. Penyediaan anggaran khusus untuk penanganan dampak bencana alam terhadap ternak juga menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks ini, isu gender menjadi perhatian penting karena dampak perubahan iklim pada subsektor peternakan cenderung lebih berat bagi perempuan, khususnya peternak kecil dan rumah tangga. Keterbatasan akses perempuan terhadap informasi iklim, teknologi adaptasi, layanan kesehatan hewan, serta sumber pembiayaan membuat mereka lebih rentan kehilangan aset ternak dan pendapatan. Perempuan juga memiliki peran besar dalam pengelolaan pakan dan perawatan ternak sehari-hari, sehingga penurunan produksi hijauan dan meningkatnya risiko penyakit secara langsung meningkatkan beban kerja dan tekanan ekonomi bagi mereka.

3. Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Lokal

Ketahanan pangan produk asal hewan harus dijaga untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Namun, produk peternakan lokal sering kalah saing dengan produk impor yang lebih murah, menyebabkan penurunan minat berusaha di bidang peternakan. Potensi konflik dalam rantai distribusi juga perlu diatasi untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien.

4. Persaingan Global dan Tekanan Pasar Produk Asal Hewan

Meningkatnya arus perdagangan bebas dan produk impor dengan harga kompetitif menjadi tantangan besar bagi produk peternakan dalam negeri. Produk asal hewan dari luar negeri seringkali memiliki efisiensi produksi dan standar mutu lebih tinggi. Tanpa peningkatan produktivitas dan efisiensi di tingkat nasional, produk lokal akan sulit bersaing di pasar domestik maupun internasional.

5. Fluktuasi Ekonomi Global dan Ketidakpastian Pasar

Perubahan ekonomi global, termasuk inflasi pangan, krisis energi, dan ketidakstabilan geopolitik, dapat mempengaruhi harga pakan, biaya transportasi, dan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha peternakan dan kesehatan hewan, terutama bagi peternak kecil yang memiliki daya tahan ekonomi terbatas.

6. Ancaman Resistensi Antimikroba (AMR) dan Keamanan Pangan

Penggunaan antimikroba yang tidak terkontrol dalam usaha peternakan berpotensi menimbulkan AMR yang dapat menular ke manusia. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi akses ekspor produk hewan Indonesia ke pasar global yang semakin ketat terhadap isu keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan secara masif untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar dan cepat dapat mendorong praktik penggunaan bahan pangan asal hewan yang tidak terjamin keamanan dan mutunya yang juga dapat berdampak pada penerima manfaat. Jika tidak diawasi dengan ketat, Program Makan Bergizi Gratis dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan/keracunan pangan atau penularan penyakit bawaan pangan.

7. Penurunan Jumlah Rumah Tangga Peternak

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian selama satu dekade mengalami penurunan di masing-masing subsektor. Berdasarkan hasil ST2023 dibandingkan dengan hasil ST2013, terjadi penurunan di tingkat rumah tangga usaha pertanian subsektor peternakan sebesar 7,11% yaitu dari 12,97 juta menjadi 12,05 juta. Penurunan tersebut diakibatkan karena usaha di bidang pertanian/peternakan kurang menarik, keuntungan kecil, tidak ada jaminan pasar, regenerasi tidak berjalan petani/peternak sudah *aging age* (sudah tua), luas lahan terbatas (Gurem), dan banyak menjadi buruh tani.

8. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian, seperti perumahan dan industri, membawa dampak kompleks dan langsung terhadap keberlanjutan subsektor peternakan. Tantangan utama adalah berkurangnya lahan hijau yang secara tradisional berfungsi sebagai sumber pakan ternak (padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan), sehingga meningkatkan ketergantungan pada pakan pabrikan yang mahal dan rentan fluktuasi harga. Selain itu, peternakan, terutama skala kecil, sering terdesak ke wilayah marjinal dengan produktivitas lebih rendah, sementara limbah peternakan yang seharusnya menjadi pupuk organik berharga semakin sulit dikelola karena keterbatasan lahan untuk penyerapan, berpotensi menimbulkan masalah lingkungan baru. Lebih jauh, berkurangnya lahan ini mempersulit implementasi sistem peternakan berkelanjutan yang membutuhkan integrasi dengan tanaman. Oleh karena itu, tantangan dari alih fungsi lahan mengharuskan subsektor peternakan beradaptasi melalui inovasi teknologi pakan, intensifikasi sistem, dan penguatan regulasi yang melindungi lahan pakan ternak sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR VETERINER MAROS

2.1 Visi Balai Besar Veteriner Maros

Visi merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Bappenas) Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi serta *positioning* organisasi dalam pembangunan nasional. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlintik yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama.

Dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih tahun 2025-2029 serta cita-cita pembangunan nasional tahun 2025-2029, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa Pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan jaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi

Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I harus dapat turut serta dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut. Untuk itu, maka Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

**"Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat
bagi Rakyat Indonesia"**

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Peternakan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternakan bermakna segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

- **Kesehatan Hewan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

- **Peternakan Maju**

Peternakan yang maju bermakna bahwa Peternakan Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik peternakan terkini pada seluruh rantai proses utama peternakan, meliputi penyiapan prasarana dan sarana peternakan, budidaya ternak berkelanjutan, kesehatan ternak, mutu dan keamanan produk asal ternak, pasca panen komoditas peternakan, pengolahan komoditas peternakan, serta pemasaran komoditas peternakan.

- **Peternakan Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Peternakan merupakan salah satu komoditas, sehingga dalam praktik Peternakan berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya Peternakan berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran subsektor peternakan adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan dalam mengurangi susut pangan asal ternak.

- **Peternakan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Peternakan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan peternakan juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan peternakan tersebut, maka manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas peternakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal peternakan.

2. Peternakan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.
3. Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan dan produk asal hewan.

Balai Besar Veteriner Maros sebagai salah satu Unit Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dapat turut serta dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029. Visi Balai Besar Veteriner Maros tahun 2025-2029 adalah:

"Pelayanan laboratorium veteriner yang maju dan berkelanjutan dalam mendukung kesehatan hewan dan ketahanan pangan nasional "

Visi Balai Besar Veteriner Maros ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Laboratorium Veteriner**

Laboratorium veteriner memiliki fasilitas khusus yang dapat digunakan untuk pemeriksaan, identifikasi, analisa penyakit hewan secara akurat dan terpercaya. Layanan laboratorium veteriner dapat berupa layanan pengujian penyakit hewan dan produk hewan, diagnosa penyakit hewan, dan penelitian. Laboratorium veteriner menjadi pilar utama dalam keamanan pangan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- **Kesehatan Hewan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

- **Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah kerawanan pangan, ada 4 pilar utama ketahanan pangan yaitu Ketersediaan pangan, Akses pangan, Pemanfaatan pangan dan Stabilitas pangan. Sub sektor peternakan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, disamping itu juga merupakan salah satu sumber utama protein hewani bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk daging, susu maupun telur.

2.2 Misi Balai Besar Veteriner Maros

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani/peternak

Kesejahteraan Petani/Peternak merupakan kondisi di mana petani/peternak dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani/peternak, mendorong kemandirian petani/peternak serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)

4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian.

Penyakit tersebut diantaranya adalah *monkeypox* (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam mewujudkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Misi ini menekankan pada peningkatan produksi ternak dengan sistem budidaya peternakan berkelanjutan agar hasil peternakan dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Budidaya peternakan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peningkatan produksi dimulai dari pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), budidaya ternak hingga produksi ternak dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dalam negeri.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat

Kesejahteraan peternak, khususnya peternak rakyat menjadi prioritas dan muara atas upaya yang dilakukan, baik dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, maupun melalui penyediaan akses terhadap pasar produk peternakan. Hilirisasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang berkeadilan, sehingga taraf hidup peternak rakyat dapat semakin meningkat. Misi ini fokus pada meningkatkan kesejahteraan maupun keadilan peternak rakyat melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, hilirisasi produk peternakan maupun memastikan ketersediaan akses pasar produk peternakan.

3. Menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat

Misi ketiga adalah menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, baik dari pangan asal ternak maupun dari penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia. Misi ini

menekankan pada pentingnya keamanan pangan asal ternak bagi kesehatan manusia. Selain itu, misi ini juga menekankan pencegahan dan penanganan penyakit hewan khususnya yang dapat berdampak kepada kesehatan manusia.

Misi Balai Besar Veteriner Maros tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029. Misi Balai Besar Veteriner Maros tahun 2025-2029 tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan diagnostik, surveilans dan pengujian veteriner yang tepat, cepat dan akurat.

Misi ini merupakan kontribusi Balai Besar Veteriner Maros dalam mendukung agenda cita bapak Presiden dalam bidang swasembada pangan dengan menyelenggarakan pelayanan pengujian dan diagnosa penyakit hewan serta kegiatan surveilans dan monitoring penyakit hewan dan produk hewan.

2. Memperkuat sistem deteksi dini dan respon cepat penyakit hewan strategis, zoonosis, *Emerging and Re_Emerging Diseases*.

Misi ini merupakan kontribusi Balai Besar Veteriner Maros dalam memperkuat sistem deteksi dini dan respon cepat dengan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di wilayah kerja bilamana terjadi kasus PHMS, zoonosis, emerging dan re emerging disease.

3. Meningkatkan sumber daya peternakan untuk mendukung penguatan potensi hilirisasi subsektor peternakan.

Misi ini merupakan kontribusi Balai Besar Veteriner Maros dalam pendampingan pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan antar hulu hilir serta peningkatan ekspor berbasis produk hewan (daging, susu, telur) dan pengujian atas penjaminan mutu hasil peternakan yang di mulai dari produksi di tingkat peternak, penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran produk akhir. Penjaminan mutu sangat penting untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pangan asal hewan yang aman, bermutu, sehat, layak konsumsi, dan halal

(ASUH), serta untuk memperkuat daya saing produk peternakan di pasar domestik dan internasional.

4. Meningkatkan tata laksana pelayanan publik yang profesional, transparan dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan

Misi ini merupakan kontribusi Balai Besar Veteriner Maros dalam memberikan pelayanan publik, sehingga Balai Besar Veteriner Maros memiliki sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelanggan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel.

2.3. Tujuan Balai Besar Veteriner Maros

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan Misi dalam mewujudkan Visi tahun 2025-2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian

Tujuan 1 Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan volume usaha pertanian dan SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT).

Tujuan 2: Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas

Tujuan 2 adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek,

namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkuler dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Tujuan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi.

Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan

Tujuan 4 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, *Anthrax*, Flu Burung, dan penyakit bawaan pangan lainnya dapat mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan Sistem Kesehatan Hewan Nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan.

Tujuan 5: Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan:

Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan 1: Meningkatnya volume usaha peternakan

Peningkatan volume usaha peternakan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu indeks harga yang diterima peternak.

Tujuan 2: Terpenuhinya produksi komoditas peternakan

Tujuan 2 adalah terpenuhinya produksi komoditas peternakan. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi pangan asal ternak prioritas, yaitu daging, telur, dan susu telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu persentase terpenuhinya produksi pangan asal ternak prioritas.

Tujuan 3: Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan

Tujuan 3 adalah terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Komoditas peternakan yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas peternakan tersebut dan meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu Volume ekspor komoditas peternakan dan indeks hilirisasi komoditas peternakan

Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan

Tujuan 4 Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, *Anthrax*, AI, dan penyakit bawaan produk hewan lainnya, dapat mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan Balai Besar Veteriner Maros Hewan tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan 1. Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros.

BBV Maros akan melaksanakan kegiatan pemenuhan pengujian PHMS pada hewan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan di ISO 17025 : 2017.

Indikator kegiatan selama 2025-2029 adalah **Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan** yang tepat waktu dengan capaian target.

Tujuan 2. Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi.

BBV Maros akan melaksanakan kegiatan pemenuhan penyediaan informasi PHMS pada hewan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan di ISO 9001 : 2018. Indikator kegiatan selama 2025-2029 adalah **Tersedianya informasi PHMS pada hewan** yang tepat waktu dengan capaian target.

Tujuan 3. Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan.

Tujuan kegiatan ini dalam rangka memenuhi permintaan pengujian keamanan produk hewan yang tepat waktu sesuai sasaran Mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001: 2018. Pengujian yang dilakukan meliputi uji cemaran mikroba, residu antibiotika, resistensi antibiotika serta uji zoonosis lainnya yang bersumber Pangan Asal Hewan (PAH). Produk hewan yang di uji dapat berupa karkas daging ruminansia besar ruminansia kecil, daging unggas, telur dan susu. Indikator kegiatan selama 2025-2029 adalah pengujian keamanan produk hewan yang tepat waktu dengan capaian target.

Tujuan 4. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner Maros yang diberikan.

BBV Maros terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan pengujian yang cepat, tepat, dan akurat. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan BBV Maros sebagai salah satu penyedia layanan publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, maka perlu diselenggarakan survei penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan pada unsur (1) persyaratan; (2) sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) waktu penyelesaian; (4) biaya/tarif; (5) produk layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan; serta (9) sarana dan prasarana. Indikator kegiatan selama 2025-2029 adalah Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan BBV Maros dengan capaian target 3,6 %

Tujuan 5. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Veteriner Maros

Pembangunan ZI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2026. Adapun penilaian dilakukan dengan memenuhi *evidence* pada 6 komponen atau area perubahan, diantaranya: 1. area perubahan manajemen perubahan; 2. area perubahan penata tatalaksana; 3. area perubahan penataan sistem manajemen SDM; 4. area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja; 5. area perubahan penguatan pengawasan dan 6. area perubahan penguatan kualitas pelayanan publik. Indikator kegiatan selama 2025-2029 adalah Tercapainya **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)** dengan capaian target 85 %.

Tujuan 6. Persentase pendampingan hilirisasi Subsektor peternakan.

Hilirisasi subsektor peternakan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan

berdaya saing global. Pasca panen dan kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antara hulu hilir, serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan.

Balai Besar Veteriner Maros, dalam mendukung Hilirisasi Subsektor peternakan melakukan pendampingan pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, pendampingan dalam kompetensi Sumber Daya Manusia, pengendalian penyakit hewan dapat berupa monitoring dan pengujian kesehatan hewan dan keamanan produk hewan serta pendampingan lainnya

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Maros maupun surat penugasan lainnya.

2.4. Sasaran Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Kegiatan (SK) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program sesuai tugas dan fungsi kementerian/Lembaga. Pohon kinerja Balai Besar Veteriner Maros tahun 2025-2029 berdasarkan Pohon kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lampiran 2 dan 3).

Tabel 8. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBV Maros Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros	IKK 1.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap pengujian PHMS di BBV Maros	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
SK 2	Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi	IKK 2.1	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBV Maros	81%	82%	83%	84%	85%
		IKK 2.2.	Tersedianya SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	249 Unit	0	0	0	0
		IKK 2.3.	Tersedianya SBSN prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	1 Unit	0	0	0	0
SK 3	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan	IKK 3.1.	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian	98%	98%	98%	98%	98%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		IKK 3.2	Tersedianya sarana bidang kesehatan hewan	1 Unit	0	0	0	0
SK 4	Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	IKK 4.1	Terdistribusinya ternak sapi potong pada kelompok penerima bantuan	-	-	-	-	-
		IKK 4.2	Terdistribusinya ternak Kambing /domba potong pada kelompok penerima bantuan	-	-	-	-	-
		IKK 4.3	Terdistribusinya ternak ayam petelur pada kelompok penerima bantuan	4.800 ekor	-	-	-	-
SK 5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	IKK 5	Peningkatan layanan dukungan manajemen internal	3.30 Skala Likert	3.30 Skala Likert	3.31 Skala Likert	3.31 Skala Likert	3.32 Skala Likert
SK 6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Ditjen di Lingkungan Kementerian Pertanian	IKK 6	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner Maros yang diberikan	3.500 Skala Likert	3.580 Skala Likert	3.590 Skala Likert	3.590 Skala Likert	3.600 Skala Likert
SK 7	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif dan Efisien dan berorientasi pada layanan prima	IKK 7	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) Balai Besar Veteriner Maros	80	85	85	85	85
SK 8	Menyelenggarakan perumusan dan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan dan hilirisasi subsektor peternakan	IKK 8.1	Persentase pelaksanaan kegiatan Hilirisasi Unggas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		IKK 8.2	Persentase pelaksanaan kegiatan investasi ternak sapi perah dan sapi pedaging	100 %	100 %	100 %	100%	100 %

2.4.1. Manajemen Risiko Balai Besar Veteriner Maros

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga perlu dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan

untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Risiko Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Renstra Kementerian Pertanian telah memasukan penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis.

Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Renstra BBV Maros Tahun 2025-2029 telah memasukan penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko memfokuskan pada risiko yang pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros. Berikut tabel manajemen risiko sasaran kegiatan (SK) BBV Maros.

Tabel 9. Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab
1	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros	Tidak tercapainya target pengujian sampel pasif yang tepat waktu	1. Peningkatan volume sampel pasif dan aktif secara bersamaan 2. Ketersediaan bahan pengujian belum mencukupi. 3. Rendahnya pelaporan dan pengiriman sampel PHM dari dinas terkait.	Kapoksi Pelayanan Veteriner

			4. Distribusi sampel pengujian PMK belum mencakup seluruh Wilker BBV Maros	
2	Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi	Tidak tercapainya target pengujian sampel pasif yang tepat waktu	1. Peningkatan volume sampel pasif dan aktif secara bersamaan 2. Ketersediaan bahan pengujian belum mencukupi. 3. Distribusi sampel pengujian PMK belum mencakup seluruh Wilker BBV Maros	Kapoksi Pelayanan Veteriner
3	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan	Tidak tercapainya target pengujian sampel pasif keamanan produk hewan yang tepat waktu	1. Penerimaan sampel produk asal hewan yang meningkat di laboratorium dalam satu waktu 2. Ketersediaan bahan pengujian belum mencukupi.	Kapoksi Pelayanan Veteriner
4	Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Pendistribusian ternak pada kelompok penerima bantuan tidak sesuai dari target.	1. Tim verifikator kurang cermat dalam verifikasi penyedia. 2. vPenyedia tidak berkomitmen sesuai kontrak	Kepala Bagian Umum
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	Indeks layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan belum optimal.	1. Penerapan SOP kenaikan pangkat pegawai belum optimal 2. Belum adanya SOP monitoring kebersihan lingkungan kantor (Outdoor dan Indoor). 3. Belum adanya pembagian area dan tugas personilnya	Kepala Bagian Umum

			4. Belum optimalnya penerapan form ceklist dokumen pembayaran. 5. Belum optimalnya implementasi Flow Administrasi pembayaran kontraktual dan non kontraktual	
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Ditjen di Lingkungan Kementerian Pertanian	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner belum optimal	Tidak tercapainya target skala likert indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner Maros yang diberikan	Kapoksi Jaminan Mutu dan Informasi Veteriner
7	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif dan Efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas Balai Besar Veteriner Maros belum optimal	Tidak tercapainya Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Veteriner Maros.	Kepala Bagian Umum
8	Menyelenggarakan perumusan dan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan dan hilirisasi hasil peternakan	Penyelenggaraan kegiatan hilirisasi sub sektor perunggasan belum optimal		Kepala Bagian Umum
		Penyelenggaraan kegiatan hilirisasi subsektor sapi perah dan sapi pedaging belum optimal	1. Belum tersedianya lahan yang <i>clean</i> dan <i>clear</i>. 2. Infrastruktur (jalan, listrik dan struktur tanah) yang belum memenuhi kriteria.	Kepala Bagian Umum

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN

3.1 Arah Kebijakan Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros

Arah kebijakan kegiatan merupakan upaya strategis (*strategic direction*) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan BBV Maros guna mencapai Visi dan Misi tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan BBV Maros disusun berdasarkan Kinerja Kegiatan Utama, Kinerja Implementasi RKAKL/L dan Kinerja Sasaran Strategis Kerja Eselon I. Sasaran kerangka strategis BBV Maros selaras dengan rumah strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, seperti diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 10. Kerangka Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029

Berdasarkan kerangka strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai BBV Maros adalah "Pelayanan laboratorium veteriner yang maju dan berkelanjutan dalam mendukung kesehatan hewan dan ketahanan pangan nasional". Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 6 (enam) pilar Kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

- Pilar Kegiatan 1. Pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros.

Pengujian PHMS merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BBV Maros terhadap sampel aktif maupun pasif dari seluruh wilayah kerja. Sampel aktif berasal dari kegiatan penyidikan dan surveilans rutin BBV Maros. Kegiatan penyidikan penyakit hewan dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan kasus atau kejadian penyakit dari masyarakat / peternak. Kegiatan penyidikan/ investigasi penyakit dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah kerja apabila telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan penyidikan penyakit mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12814/ KPTS/ HK.160/F/11/ 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Penyakit Hewan, maupun bekerjasama dengan tim BBV Maros.

Jenis PHMS yang endemis di wilayah kerja BBV Maros diantaranya : Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Avian Influenza (AI)*, Antraks, Brucellosis, Rabies, *Classical Swine Fever (CSF)*, *African Swine Fever (ASF)*, Jembrana, Salmonellosis pada unggas dan Surra. Adapun PHMS strategis yang tidak ada di wilayah kerja namun wajib menjadikan kewaspadaan terutama saat lalu lintas ternak hewan besar adalah penyakit *Lumpy Skin Disease (LSD)*. Selain PHMS juga terdapat penyakit zoonosis prioritas yang hanya ada di wilayah kerja BBV Maros yaitu Schistosomiasis. Keseluruhan pengujian laboratorium untuk PHMS dan penyakit zoonosis prioritas tersebut di atas wajib tersedia di BBV Maros. Selain itu masih terdapat penyakit hewan menular lainnya diluar PHMS dan zoonosis prioritas yang masuk ke dalam daftar pengujian laboratorium BBV

Maros yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan baik Dinas, Perusahaan, maupun masyarakat umum yang membutuhkan.

- Pilar Kegiatan 2. Informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi.

Berdasarkan kegiatan pengujian laboratorium BBV Maros terhadap PHM, PHMS maupun penyakit zoonosis prioritas pada Pilar Kegiatan 1, maka akan tersedia informasi secara berkala yang dikeluarkan oleh BBV Maros berupa peta penyakit yang tersedia secara online (melalui website), *softcopy* maupun *hardcopy* (apabila diperlukan). Informasi PHMS dari BBV Maros tersebut adalah menjadi salah satu dasar untuk penetapan Keputusan Menteri Pertanian tentang status dan situasi penyakit di Indonesia terutama di wilayah kerja BBV Maros berdasarkan Permentan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan.

- Pilar Kegiatan 3. Pengujian keamanan produk hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros

Pengujian keamanan produk hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros berfokus pada penjaminan mutu produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penyakit zoonosis dan residu yang berbahaya. Arah Kebijakan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah :

Kegiatan 3.1. Pengujian produk produk (daging, susu, telur dan turunannya) akan higiene, sanitasi dan keamanan produknya dari cemaran mikroba.

Kegiatan 3.2. Pengujian residu dan bahan berbahaya (antibiotika, hormon, logam berat dan zat kimia lainnya yang terdapat dalam produk hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

- Pilar Kegiatan 4. Penyusunan tata laksana kegiatan di Balai Besar Veteriner Maros.

Tata laksana pelayanan publik merupakan pengaturan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Balai Besar Veteriner Maros dalam penyusunan tata laksana kegiatannya adalah meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan akuntabilitas pelayanan Balai Besar Veteriner Maros.

Arah Kebijakan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

Kegiatan 4.1: Penyusunan proses bisnis dan pelaksanaan pelayanan surveilans dan investigasi veteriner.

Kegiatan 4.2: Penyusunan proses bisnis dan pelaksanaan pelayanan pengujian dan diagnostik veteriner.

Kegiatan 4.3. Penyusunan proses bisnis dan pelaksanaan jaminan mutu dan informasi veteriner.

Penyusunan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya di Balai Besar Veteriner Maros dan secara umum bagi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan kementerian pertanian serta terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.

- Pilar Kegiatan 5. Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak.

Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Balai Besar Veteriner Maros berdasarkan Surat Penugasan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Pilar Kegiatan 6. Layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan.

Layanan Dukungan Manajemen merupakan program layanan yang diberikan Ditjen PKH untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kementerian. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan terdiri dari : 1. Layanan dukungan manajemen internal sebanyak 7 layanan (4 layanan BMN, 1

layanan umum dan 2 layanan perkantoran), 2. Layanan manajemen SDM Internal 75 layanan dan 3. Layanan manajemen kinerja internal sebanyak 13 dokumen (Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan target 1 Dokumen dan Layanan Manajemen Keuangan dengan target 12 Dokumen).

Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan kementerian pertanian serta terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.

3.2. Kontribusi BBV Maros terhadap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan guna menjamin ketahanan pangan nasional dan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong peningkatan kesejahteraan peternak, perlu dilakukan percepatan produksi susu dan daging nasional. Hal ini sebagai upaya mewujudkan asta cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Kontribusi Balai Besar Veteriner Maros dalam percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional yang masuk dalam indikasi Program Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029, adalah :

Tabel 10. Kontribusi kegiatan Balai Besar Veteriner Maros dalam mendukung Sasaran Strategi dan Sasaran Program Dirjen PKH.

NO	Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP)	KONTRIBUSI
		Balai Besar Veteriner Maros
1	SS 7. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Penularan Penyakit Hewan	
	SP 7. Terkendalinya wilayah/kawasan dari penyakit hewan	SK.1. Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros

NO	Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP)	KONTRIBUSI
		Balai Besar Veteriner Maros
		SK 2. Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi.
	SP 6. Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	SK 3. Terpenuhinya pengujian Keamanan produk hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros
2	SS 2. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	
	SP 5. Terpenuhinya produksi komoditas peternakan	SK 8. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan dan hilirisasi sub ektor peternakan
3	SS 4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggul	
	SP 5. Terpenuhinya produksi komoditas peternakan	SK 4. Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak.
4.	SS 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi	
	SP 6. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel.	SK 5. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan
		SK 6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Ditjen di Lingkungan Kementerian Pertanian
		SK 7, Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini mencerminkan ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai organisasi, yang meliputi: Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memantau perkembangan, mengukur keberhasilan, dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan/program yang dilaksanakan selaras dengan rencana strategis yang telah disusun.

Target kinerja BBV Maros disusun melalui serangkaian FGD dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menyepakati Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) beserta indikator kinerja (IKP dan IKK) beserta target. Penentuan SP, SK, IKP, dan IKK BBV Maros dilakukan dengan mengacu pada Sasaran Strategis Kementan, Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta RPJMN dan RPJPN. Berikut Target Kinerja Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2025-2029:

Tabel 11. Target Kinerja Kegiatan BBV Maros Tahun 2025-2029.

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros	IKK 1.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap pengujian PHMS di BBV Maros	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 2	Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi	IKK 2.1	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBV Maros	81%	82%	83%	84%	85%
		IKK 2.2.	Tersedianya SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	249 Unit	0	0	0	0
		IKK 2.3.	Tersedianya SBSN prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	1 Unit	0	0	0	0
SK 3	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan	IKK 3.1.	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian	98%	98%	98%	98%	98%
		IKK 3.2	Tersedianya sarana bidang kesehatan hewan	1 Unit	0	0	0	0
SK 4	Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	IKK 4.1	Terdistribusinya ternak sapi potong pada kelompok penerima bantuan	-	-	-	-	-
		IKK 4.2	Terdistribusinya ternak Kambing /domba potong pada kelompok penerima bantuan	-	-	-	-	-
		IKK 4.3	Terdistribusinya ternak ayam petelur pada kelompok penerima bantuan	4.800 ekor	-	-	-	-
SK 5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	IKK 5	Peningkatan layanan dukungan manajemen internal	3.30 Skala Likert	3.30 Skala Likert	3.31 Skala Likert	3.31 Skala Likert	3.32 Skala Likert
SK 6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dirjen di Lingkungan Kementerian Pertanian	IKK 6	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner Maros yang diberikan	3.500 Skala Likert	3.580 Skala Likert	3.590 Skala Likert	3.590 Skala Likert	3.600 Skala Likert
SK 7	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif dan Efisien dan berorientasi pada pelayanan prima	IKK 7	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) Balai Besar Veteriner Maros	80	85	85	85	85
SK 8	Menyelenggarakan perumusan dan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan,	IKK 8 1	Persentase pelaksanaan kegiatan Hilirisasi Unggas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	kesehatan hewan dan hilirisasi subsektor peternakan	IKK 8.2	Persentase pelaksanaan kegiatan investasi ternak sapi perah dan sapi pedaging	100 %	100 %	100 %	100%	100 %

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen krusial dalam Renstra BBV Maros tahun 2025-2029. Kerangka ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencakup sumber pendanaan APBN yang meliputi Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Hibah luar negeri.

Melalui kerangka pendanaan yang komprehensif, BBV Maros berkomitmen untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia selama periode 2025-2029. Target kinerja dan kerangka pendanaan BBV Maros dapat dilihat pada tabel target kinerja dan kerangka pendanaan BBV Maros 2025-2029 pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Renstra BBV Maros tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam mewujudkan visi “Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”. Renstra ini telah dirancang dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional, termasuk RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025- 2029, Renstra Kementerian Pertanian, serta Asta Cita sebagai landasan kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kontribusi BBV Maros terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui implementasi Renstra ini, BBV Maros berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, BBV Maros siap menghadapi dinamika global dan lokal, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Renstra ini dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai kemajuan subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang lebih baik di masa depan.

Lampiran 1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Program/ Kegiatan		Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Output Lokal	Target Capaian Janji Layanan					Alokasi (Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS														
		1784. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan														Balai Besar Veteriner Maros
KRO	QJC. Penyidikan dan Pengujian Penyakit															Kinerja Utama (PK)
RO	QJC.001	Sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi	Sampel	88%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%	0	0	0	0	0	
SK 1.1		Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros	Hari	Persentase	Lokal	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase						
1	IKSK 1.1.1	Persentase pengujian Anthrax yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Anthrax di BBV Maros	2-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
2	IKSK 1.1.2	Persentase pengujian Rabies yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Rabies di BBV Maros	1-35	99%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
3	IKSK 1.1.3	Persentase pengujian Salmonellosis yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Salmonellosis di BBV Maros	2-21	83%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
4	IKSK 1.1.4	Persentase pengujian Brucellosis yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Brucellosis di BBV Maros	2-25	86%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
5	IKSK 1.1.5	Persentase pengujian Avian Influenza yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Avian Influenza di BBV Maros	3-5	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
6	IKSK 1.1.6	Persentase pengujian PRRS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PRRS di BBV Maros	4-8	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
7	IKSK 1.1.7	Persentase pengujian Septicaemia Epizootica yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Septicaemia Epizootica di BBV Maros	3-14	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
8	IKSK 1.1.8	Persentase pengujian IBR-IPV yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian IBR-IPV di BBV Maros	4-8	50%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
9	IKSK 1.1.9	Persentase pengujian Leptospirosis yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Leptospirosis di BBV Maros	4-8	0%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
10	IKSK 1.1.10	Persentase pengujian Jembrana yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Jembrana di BBV Maros	3-8	98%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
11	IKSK 1.1.11	Persentase pengujian Surra yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Surra di BBV Maros	4-8	97%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
12	IKSK 1.1.12	Persentase pengujian Classical Swine Fever yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Classical Swine Fever di BBV Maros	4-6	97%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
13	IKSK 1.1.13	Persentase pengujian Penyakit Mulut dan Kuku yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Penyakit Mulut dan Kuku di BBV Maros	3-5	99%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
14	IKSK 1.1.14	Persentase pengujian Lumpy Skin Disease yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Lumpy Skin Disease	3-5	86%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
15	IKSK 1.1.15	Persentase pengujian African Swine Fever yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian African Swine Fever di BBV Maros	3-5	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
16	IKSK 1.1.16	Persentase pengujian Bovine Viral Diarrhea yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian Bovine Viral Diarrhea di BBV Maros	4-8	90%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
17	IKSK 1.1.17	Persentase pengujian Schistosomiasis terhadap permintaan pengujian Schistosomiasis di BBV Maros	2-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						

Lampiran 2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Output Lokasi	Target Capaian Jangl Layanan					Alokasi (Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS																
1786. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner																
KRO QJA. Penyidikan dan pengujian produk															Balai Besar Veteriner Maros	
RO	QJA. 001	Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan	Produk	97%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%	0	0	0	0	0	Kinerja Utama (PK)
SK 3	Terpenuhinya permintaan pengujian Keamanan Produk hewan		Hari	Persentase	Lokasi	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase						
1	IKSK 3.1.1	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (ALT Enumerasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (ALT Enumerasi) di BBV Maros	4-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
2	IKSK 3.1.2	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (AST Antimikrobia terhadap E.Coli Disk Diffusion) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (AST Antimikrobia terhadap E.Coli Disk Diffusion) di BBV Maros	3-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
3	IKSK 3.1.3	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Camphylobacter spp Isolasi dan Identifikasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Camphylobacter spp Isolasi dan Identifikasi) di BBV Maros	23	98%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
4	IKSK 3.1.4	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Coliform Enumerasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Coliform Enumerasi) di BBV Maros	4-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
5	IKSK 3.1.5	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (E.Coli Enumerasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (E.Coli Enumerasi) di BBV Maros	4-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
6	IKSK 3.1.6	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (E.Coli Isolasi dan Identifikasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (E.Coli Isolasi dan Identifikasi) di BBV Maros	4-7	80%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
7	IKSK 3.1.7	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Enterobacteriaceae Enumerasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Enterobacteriaceae Enumerasi) di BBV Maros	4-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
8	IKSK 3.1.8	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Residu Antibiotika 4 Golongan Bioassay) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Residu Antibiotika 4 Golongan Bioassay) di BBV Maros	4-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
9	IKSK 3.1.9	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Antibiotika golongan tetracycline) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Antibiotika golongan tetracycline) di BBV Maros	4-8	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
10	IKSK 3.1.10	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Salmonella spp Isolasi dan Identifikasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Salmonella spp Isolasi dan Identifikasi) di BBV Maros	7-14	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
11	IKSK 3.1.11	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Staphylococcus aureus Enumerasi) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Staphylococcus aureus Enumerasi) di BBV Maros	4-7	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
12	IKSK 3.1.12	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Boraks Kualitatif) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Boraks Kualitatif) di BBV Maros	1-3	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
13	IKSK 3.1.13	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Formalin kualitatif) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Formalin kualitatif) di BBV Maros	1-3	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
14	IKSK 3.1.14	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (Organoleptik daging) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (Organoleptik daging) di BBV Maros	1-2	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						
15	IKSK 3.1.15	Persentase pengujian Keamanan produk hewan (pH potensiometri) yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian keamanan produk hewan (pH potensiometri) di BBV Maros	1-2	100%	Maros	98%	98%	98%	98%	98%						

Lampiran 3. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dokumen Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Program/ Kegiatan		Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Output Lokasi	Target					Alokasi (Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																
1787. Dokumen manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Peternakan															Balai Besar Veteriner Maros	
1	EBA.956	Layanan BMN	Layanan	4	Maros	4	0	0	0	0	8,034,000					
2	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	Maros	1	0	0	0	0	66,230,000					
3	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	2	Maros	2	2	2	2	2	11,620,011,000					
4	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Layanan	76	Maros	76	0	0	0	0	27,053,000					
5	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	Maros	1	1	1	1	1	12,210,000					
6	EBD.955	Layanan Manajemen keuangan	Dokumen	12	Maros	12	2	2	2	2	47,117,000					
SK 5		Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efoisien dan Berorientasi pada layanan prima														
1	IKSK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Veteriner (BBV) Maros yang diberikan.	Skala Likert	3.075	Maros	3.50	3.60	3.60	3.60	3.60						
2	IKSK 4.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Veteriner (BBV) Maros	Nilai	80	Maros	80	85	85	85	85						



POHON KINERJA DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2025-2029



SS 7. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan

IK. Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner

SP9. Terkendalinya wilayah/kawasan pengendalian penyakit hewan

IK. Persentase wilayah/kawasan terkontrol dari penyakit hewan

SP10. Meningkatnya respon kejadian kasus penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia

IK. Persentase respon kasus zoonosis pada manusia

DIT KESWAN

SK. Meningkatnya ketersediaan obat Hewan dan alat Kesehatan hewan

IE. persentase jumlah produk obat hewan dan alat kesehatan hewan yang terregistrasi terhadap jumlah pengajuan registrasi produk obat hewan dan alat kesehatan hewan

SK. Meningkatnya kemampuan deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan

IE. Persentase penyakit hewan yang dideteksi dan direspon dengan cepat terhadap jumlah keseluruhan laporan penyakit hewan

SK. Meningkatnya layanan kelembagaan dan sumber daya Kesehatan hewan yang sesuai persyaratan guna mendukung Siskesehatan

IK. Persentase jumlah layanan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan (UPKH) dan laboratorium kesehatan hewan sesuai persyaratan

SK. Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan

IK. Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan

SK. Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar

IK. Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar

SK. Terlaksananya pengujian PHMSZ pada ternak

IK. Persentase pengujian PHMSZ yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan

DIT KESMAVET

SK. Tersedianya pengawasan keamanan komoditas produk peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IK. Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total kontaminasi produk peternakan siap edar

SK. Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan

IK. Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan

SK. Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan

IK. Persentase kepatuhan unit usaha terhadap penerapan kesejahteraan hewan

SK. Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan

IE. Persentase layanan Kesehatan masyarakat veteriner yang sesuai dengan Service Level Agreement

SK. Meningkatnya keamanan dan kesehatan produk hewan

IE. Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi

Lampiran 5. Pohon kinerja meningkatkan kesehatan masyarakat dari Penularan Penyakit Hewan Ditjen PKH 2025-2029

